

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SORONG

Berti Pakaila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong

Email : bertipakaila@gmail.com

Abstract: *The system and procedures for collecting parking fees in the Sorong City Government, in this case the City Regional Revenue Agency, carries out a work system which includes: making special levies that are collected directly by daily officers, who are assigned by the Head of Retribution to regulate retribution activities, especially in parking locations that have many problems. From the parking levies, a ticket is prepared which is used as a valid parking levy bill based on the regional regulation (PERDA) of Sorong City. The formulation of the problem in this paper is how the system and procedures for parking levies that are managed by the Regional Revenue Agency in order to increase the original regional income of the City of Sorong.*

Keywords: *Parking Retribution, Sorong City Government, PAD, Daily Officer, Service Retribution.*

PENDAHULUAN

Suatu daerah dapat disebut otonomi apabila daerah tersebut dapat membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jika suatu daerah otonomi belum mampu sepenuhnya membiayai urusan rumah tangganya sendiri maka paling tidak daerah tersebut harus mampu menetapkan belanja rutinya dengan pendapatan hasil daerah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan faktor keuangan merupakan faktor sosial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam pelanggarannya urusan rumah tangga, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk mengukur alat dan jasa sebagai penukar menduduki posisi paling penting dalam urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembayaran, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem dan prosedur pemungutan retribusi parkir di Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota melakukan sistem kerja yang diantaranya melakukan pungutan retribusi secara khusus yaitu yang dipungut langsung oleh petugas harian Badan pendapatan Daerah, yang ditugaskan oleh Ka Subdin Retribusi sebagai berikut : Petugas harian melakukan tugas pungutan mulai dari jam 08.00 wit pagi sampai dengan jam 12.00 WIT dan cara petugas pungutan retribusi yang bertugas jam 08.00 WIT menyeteror jam 12.00 WIT ke bagian penagihan dan pencatatan Sub Badan Retribusi. Melakukan pungutan retribusi dengan cara bagi hasil yaitu yang dilakukan oleh pengelola wilayah contoh dari pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pengelola wilayah yaitu lokasi parkir saga supermarket, lokasi parkir Supermarket Yohan dan Supermarket Papua.

Dengan cara kerja pungutan retribusi parkir sebagai pengelola wilayah menugaskan petugas pungutan retribusi parkir yang berdomisili disekitar wilayah/ tempat lokasi pengelola pada pengelola wilayah ini didistribusikan karcis dari Badan pendapatan Daerah/ Sub Badan Retribusi bagian penagihan dan pencatatan setiap bulan/ per bulan disetor sesuai dengan jumlah karcis yang digunakan atau terpakai dengan sistem bagi hasil yaitu 40% disetor ke Badan Pendapatan daerah Sub Badan Retribusi bagian penagihan dan pencatatan dan pembagian 60% milik pengelola wilayah. Suatu daerah yang otonomi itu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas daerahnya. Pemerintah daerah harus menyiapkan biaya atau dana untuk kegiatan-kegiatan dimaksud oleh sebab itu untuk memperoleh dana Badan pendapatan daerah melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan dana atau uang yaitu salah satu pungutan retribusi paker. Badan pendapatan daerah dalam kegiatannya untuk mendapatkan dana atau uang, yang dalam hal ini ditugaskan kepada petugas-petugas lapangan, Ka Subdin retribusi menyiapkan parkir namun petugas dalam menjalankan tugas ini sebagai petugas pungutan retribusi parkir banyak kendala yang terjadi menyebabkan terjadinya tidak tercapainya target karena yang bertugas di lapangan, lokasi parkir dengan baik dan disiplin. Petugas sering kali tidak berada di tempat parkir, petugas memberikan tugas pungutan/tagihan retribusi kepada pemuda di sekitar lokasi parkir sehingga tidak tertib dan tidak teratur jumlah karcis dan jumlah uang tidak sesuai dengan jumlah karcis yang didistribusikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem dan Prosedur

Sistem informasi menurut A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah sebagai berikut : Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan

pengelolaan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnard dan Hopwood (2000:23) Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Gordon B. Davis (1998:15) sebuah sistem informasi mempunyai subsistem-subsistem fisik berupa perangkat computer, perangkat lunak (yang terdiri dari perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum dan program aplikasi), prosedur dan manusia (petugas pengoperasiannya). Pengertian sistem informasi menurut Joseph W. Wilkinson dalam buku “Sistem Akuntansi dan Informasi” yang diterjemahkan oleh Agus Maulana (1993 : 3) adalah sebagai berikut : sistem ini mengkoordinasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Pengertian sistem informasi menurut Josep W. Wilkinson (1993 : 4) adalah : sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran. Menurut Joseph W. Wilkinson (1997 : 60) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi formal yang mengandung karakteristik meliputi tujuan (kegunaan), tahap-tahap pengguna dan sumber daya. Sistem menekankan pada prosedur menurut Jerry Fitzerald, et.al adalah suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem menekankan pada elemen : sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem untuk membedakan sistem dapat dilakukan dengan pendekatan karakteristik yang melekat pada suatu system

Prosedur menurut Richard F. Neuschel didefinisikan sebagai berikut suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (Fulls menulis) biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih Departemen yang untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Prosedur menurut Jerry Fitzerald, et.al didefinisikan sebagai berikut urutan yang terjadi dari tahapan intruksi yang merupakan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya. Sistem dan prosedur pada retribusi parkir yaitu suatu kegiatan kerja pemerintah daerah yang dikelompokkan dalam urusan pajak daerah. Yang di dalamnya terdapat urusan retribusi parkir yang dimuat dalam Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan / diberikan oleh pemerintah contohnya : tempat parkir, pasar dan lain-lain. Dan Perda No.2 Tahun 2011 tentang retribusi parkir . Suatu sistem pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Sorong yaitu bagaimana

pemerintah Kota dalam menerapkan suatu sistem dan cara untuk mengelola dan menggali potensi Pendapatan asli Daerah Kota Sorong. Yang dalam pengelolaannya diterapkan cara atau prosedur berdasarkan peraturan daerah (PERDA) yang berlaku.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan oleh AICPA (American Institute Of Certified Public Accountants) sebagai berikut : Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harga milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisien dalam usaha dan membantu mendorong dipatihinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Definisi dirinci lagi oleh AICPA (America Institute Of Certified Public Accountants) dalam statemen on auditing standard nomor 1 menjadi pengendalian administrative dan pengawasan akuntansi sebagai sebagai : Pengendalian Akuntansi terdiri dari stuktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan financial dan konsekuensinya, organisasi, prosedur dan catatan-catatan itu disusun untuk memberi jaminan yang cukup.

- a. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus
- b. Transaksi-transaksi dicatat untuk (1) memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang umumnya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut (2) menunjukkan pertanggung jawaban atas aktiva.
- c. Penggunaan aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan otorisasi manajemen

Retribusi Parkir

Retribusi adalah alat yang digunakan untuk pembayaran (Bea/ongkos) penggunaan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Dari pengertian retribusi maka setiap pengguna fasilitas umum wajib membayar retribusi, khusus kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua yang menggunakan fasilitas atau lokasi-lokasi parkir yang dikelola di suatu daerah tertentu. Pada umumnya retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Sorong yang tidak dipisahkan dengan retribusi lainnya yang dikelola oleh Pemerinta Daerah Kota Sorong dalam hal ini Bapenda, yang diatur menurut Peraturan daerah (PERDA). Retribusi parkir diseluruh area kerja Pemerintah Kota Sorong ini sangatlah menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam sistem pemungutan retribusi parkir, pemerintah daerah kota ditugaskan kepada pemungutan retribusi parkir, pemerintah daerah kota yang ditugaskan kepada Bapenda melakukan sistem kerja.

METODE

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon. Kemudian untuk menganalisa penerapan sistem dan prosedur pungutan retribusi parkir yang menjamin pemanfaatan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah yang optimal, dengan memperhatikan lokasi-lokasi parkir, karcis retribusi parkir dan petugas pungutan retribusi parkir. Analisis terhadap penerapan pengendalian interen yang mencakup pengendalian umum yaitu pengendalian manajemen, pengendalian dokumentasi dan pengendalian transaksi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari lokasi-lokasi yang dikelola oleh pengelola wilayah ini yang banyak terjadi tidak teratur penyetoran dari pengelola wilayah kepada badan pendapatan daerah dalam hal ini sub dinas retribusi, terdapat penyetoran tidak sesuai pendistribusian karcis (jumlah karcis yang digunakan), terjadi kurang harmonis antara pengelola wilayah dengan petugas pungutan yang ditugaskan oleh pengelola wilayah sehingga mengakibatkan tertundannya penyetoran pada waktu yang ditentukan. Yang merupakan daerah atau lokasi yang dikelola oleh wilayah yaitu parkir Saga Supermarket, Yohan Supermarket, Papua Supermarket, Mega Mall dan lainnya yang sistem penyetoran per bulan. Dengan pembagian hasil pungutan retribusi parkir sebagai berikut, hasil pendapatan dari pengelola wilayah disetor kepada Badan pendapatan Daerah (Sub Dinas Retribusi) bagian penaguhan dan pencatatan sebesar 40% dan 60% untuk pengelola wilayah. Dari 60% ini pula akan dibayarkan gaji/upah bagi petugas pungutan retribusi parkir yang ditugaskan oleh pengelola wilayah. Karcis yang digunakan seringkali tidak diberikan kepada penggunaan lokasi parkir sehingga banyak beredar isu yang mencorag nama Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong dan juga sebaliknya dari pengguna lokasi parkir. Yang biasanya menjadi perbincangan soal karcis yang digunakan ini terjadi di kendaraan umum (Taxi) pada penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum. Salah satu ukuran keberhasilan daerah otonomi dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan, retribusi parkir mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan peningkatan usaha-usaha pembangunan dan juga pembiayaan urusan rumah tangga daerah karena retribusi parkir disusun dan dirangkakan dalam rencana / perencanaan target penerimaan retribusi daerah dan peruntungan bagi daerah lainnya. Karena itu

retribusi parkir merupakan bagian dari daerah lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Retribusi parkir mempunyai pengaruh penting karena penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KESIMPULAN

1. Belum ada penerapan sistem dan prosedur yang baik dari Badan pendapatan Daerah kota Sorong dalam pemungutan retribusi sehingga menyebabkan sering kali terjadi sistem pemungutan di area parkir menjadi tidak efektif.
2. Tidak teratur penyetoran dari pengelola wilayah kepada Badan Pendapatan Daerah atau Sub Dinas Retribusi itu seperti penyetoran tidak sesuai pendistribusian karcis, kurang harmonis antara pengelola wilayah dengan petugas pungutan yang ditugaskan oleh pengelola wilayah sehingga mengakibatkan tertundanya penyetoran pada waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwani, zaki. Sistim Informasi akuntansi, edisi II, Yogyakarta: BPFE, 1994
- Basu, Swastha. Manajemen penjualan, Edisi ke-3, Yogyakarta : BPFE, 1993
- Cushign, Barry E. Terj. Sistim Informasi akuntansi dan organisasi Perusahaan. Edisi ke-3, oleh Ruchyat Kosasih, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Gushing, Barrt E. Sistim Informasi Akuntansi dan Informasi. Edisi ke- 3. Terjemahan Ruchyat Kosasih. Jakarta : Erlangga.
- Hogngren, Charles T. Ters. Pengantar Akuntansi Manajemen, Edisi Ke-3, Jilid II Ahli Bahasa Frederikson Saragih, Jakarta : Erlangga, 1993.
- Indra Bastian, Ph. D, MBA, AKT. Sistim akuntansi Sektor Publik, Edisi II.
- Jogiyanto, H.M. Joseph W. Sistim Akuntansi Berbasis Komputer. Jilid II. Yogyakarta : BPFE, 1993
- J. Supranto, M.A. Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran, Edisi ke- VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997
- Kolter, Philip dan Gary Armstrong, Trj. Dasar-dasar Pemasaran, Edisi ke- III. Jilid II, Ahli Bahasa Willhelinus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia, 1997

- Kasubag umum dan kepegawaian, Ruth. W. Solossa, S. sos, NIP. 197811302001122003
Laporan Tahunan 1998 PR. United Tractor Tbk, Jakarta : PT. United Tractor Tbk, 1998
Mulyadi, Sistim Akuntansi, Edisi III. Yogyakarta : Edisi III. Yogyakarta : STIEK
YKPN, 1993
Niko Isir, S.sos. Bidang Retribusi Daerah. NIP 197701042006051002
Siegel, Joelg dan Joe K, Shim. Istilah Akuntansi, edisi I,II,III. Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 1994.
Sofyan Syafri, Harapan Budgeting : Perencanaan untuk membantu Manajemen.
Cetakan ke – I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
The Liang Gie. Pertumbuhan Daerah di Negri Republik Indonesia. 1968. Hal 168
Usry, Milton F. dan Adolph Matz. Ters. Akuntansi biaya: Perencanaan dan
pengendalian, edisi Ke-10, Jakarta: Erlangga, 1997
Viale, J, David. Dasar-Dasar Manajemen Sedia. Terjemaan : Erlinda M. Nurson,
Jakarta: PPM, 1993
Willhelinus W. Bakowatun. Pesaran, edisi ke VI, Jilid II Jakarta : Intermedia, 1997
Wajong. Adminisdtrasi Keuangan Daerah tahun 1976, hal. II